

**LAMPIRAN I :**  
**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK**  
**INDONESIA**  
**NOMOR 53 TAHUN 2011**  
**TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM**  
**DAERAH**

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**C. BENTUK PROGRAM LEGISLASI PROVINSI**

**1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH .....**

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				

**KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,.....**

.....

## B. BENTUK PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN/KOTA

### 2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,.....

.....

### **C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian**  
**Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**  
**Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**  
**Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**  
**Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang baru**  
**Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**  
**Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi**  
**Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**  
**Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**  
**Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**GAMAWAN FAUZI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM**

**ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19690824 199903 1 001**

**LAMPIRAN II :  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

**JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I           PENDAHULUAN**

**BAB II           KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**BAB III          EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT**

**BAB IV          LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

**BAB V           JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG  
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**BAB VI          PENUTUP**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**Uraian singkat setiap bagian:**

**1. BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

**A. Latar Belakang**

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan

dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## **2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

## **3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

## **4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

## **C. Landasan Yuridis.**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## **5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

## **6. BAB VI PENUTUP**

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### **A. Simpulan**

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### **B. Saran**

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan

di bawahnya.

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

#### **7. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

#### **8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA**

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd  
GAMAWAN FAUZI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM**

**ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19690824 199903 1 001**



**LAMPIRAN III :  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 53 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH**

**I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi)  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**(nama Peraturan Daerah)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR (Nama Provinsi),**

**Menimbang : a. bahwa ...;  
                  b. bahwa ...;  
                  c. dan seterusnya ...;**

**Mengingat : 1. ...;  
                  2. ...;  
                  3. dan seterusnya ...;**

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ...  
(Nama Provinsi)  
dan  
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**BAB II**

**...  
Pasal ...**

**BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ...**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).**

**Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)  
tanda tangan  
NAMA**

**Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi),  
tanda tangan  
NAMA**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...**

**II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama kabupaten/kota)  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**(nama Peraturan Daerah)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota),**

**Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;**

**Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;**

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ...  
(nama kabupaten/kota)  
dan  
BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**BAB II  
...  
Pasal ...**

**BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal . . .**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).**

**Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
BUPATI/WALIKOTA...(nama  
kabupaten/kota),**

**tanda tangan  
NAMA**

**Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota),**

**tanda tangan  
NAMA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)  
TAHUN ... NOMOR ...**

**III. PERATURAN KEPALA DAERAH**

**A. Peraturan Gubernur**

**PERATURAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi)**

NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Gubernur)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang : a.bahwa.....;  
b.bahwa.....;  
c. dan seterusnya..... ;  
Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3.dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ... (Judul  
Peraturan Gubernur).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
GUBERNUR      PROVINSI...,      (Nama  
Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Provinsi)

(Nama)

BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

#### B. Peraturan Bupati/Walikota

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati/Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG... (Judul  
Bupati/Walikota).

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

**BAB II**  
**Bagian Pertama**

.....

**Paragraf 1**

**Pasal ..**

**BAB ...**

**Pasal ...**

**BAB ...**

**KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)**

**BAB ..**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal ...**

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kabupaten/  
Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten/Kota)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama  
Kabupaten/Kota)TAHUN ... NOMOR ...

#### IV. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

##### A. Peraturan Bersama Gubernur

**PERATURAN BERSAMA GUBERNUR... (Nama Provinsi)  
DAN GUBERNUR... (Nama Provinsi)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**(Judul Peraturan Bersama)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR ... (Nama Provinsi) dan  
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)**

**Menimbang** : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

**Mengingat** : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BERSAMA GUBERNUR... (Nama Provinsi) DAN GUBERNUR... (Nama Provinsi) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:**

**BAB II**

**Bagian Pertama**

.....

**Paragraf 1**

**Pasal ..**

**BAB ...**

**Pasal ...**

**BAB ...**

**KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)**

**BAB ..**

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi) dan Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

GUBERNUR..., (Nama Provinsi)  
Provinsi)

GUBERNUR..., (Nama

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)  
Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH ...,  
(Nama Provinsi)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama  
Provinsi)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...

## B. Peraturan Bersama Bupati/Walikota

PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama  
Kabupaten/Kota)

DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;



**Mengingat** : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

**BAB II**

**Bagian Pertama**

.....

**Paragraf 1**

**Pasal ..**

**BAB ...**

**Pasal ...**

**BAB ...**

**KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)**

**BAB ..**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal ...**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota) BUPATI/WALIKOTA...,  
(Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan

Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)	Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)
---	---

(Nama)	(Nama)
--------	--------

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...
--

## V. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

### A. Keputusan Gubernur

KEPUTUSAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Keputusan Gubernur)  
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang	: a. Bahwa.....;
	b. bahwa.....;
	c. dan seterusnya.....;
Mengingat	: 1. ....;
	2. ....;
	3. dan seterusnya.....;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	
KESATU :	.....
KEDUA :	.....
KETIGA :	.....
KEEMPAT :	.....
KELIMA :	.....

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
GUBERNUR PROVINSI..., (Nama  
Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. Keputusan Bupati/Walikota

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota)**  
**NOMOR ... TAHUN ...**  
**TENTANG**  
**(Judul Keputusan Bupati/Walikota)**  
**BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kabupaten/Kota)**

**Menimbang** : a. Bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

**Mengingat** : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**KESATU** :  
**KEDUA** :  
**KETIGA** :  
**KEEMPAT** :  
**KELIMA** :

**Ditetapkan di ...**  
**pada tanggal**  
**BUPATI/WALIKOTA..., (Nama kab/Kota)**

**(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)**

**MENTERI DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**GAMAWAN FAUZI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BIRO HUKUM**

**ZUDAN ARIF FAKRULLOH**  
**Pembina Tk.I (IV/b)**  
**NIP. 19690824 199903 1 001**